

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RIJANG PANUA**

Yuyun Afrianti¹, Abdul Jabbar², Akhmad Yasin³

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: yuyunafrianti1312@gmail.com

Email: jbr.nyonk1@gmail.com; akhmadyasin02@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Village Fund Allocation (ADD) management in an effort to improve the capacity and independence of the Rijang Panua village community, with a focus on communication, resources, implementers' attitudes, as well as bureaucratic organizational structure and transparency. The study uses a descriptive quantitative approach with a sample of 88 respondents, determined using the simple random sampling method. Data were collected through questionnaires, interviews, observations, and documentation, then analyzed using validity and reliability tests, as well as simple regression analysis with SPSS. The findings reveal that the implementation of ADD management falls into the very good category, with an average achievement of 89%, while community empowerment is in the good category, averaging 87%, covering access, participation, control, benefits, and independence. However, the simple regression results indicate that Village Fund Allocation (ADD) management only contributes 0.9% to supporting the improvement of community capacity, while 99.1% is influenced by other variables. This indicates that although ADD implementation runs well, its impact on community independence remains limited.

Keywords: Village Fund Allocation, Policy Implementation, Community Empowerment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat Desa Rijang Panua dengan fokus pada unsur komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur organisasi birokrasi dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah sampel 88 Responden ditentukan menggunakan metode simple random sampling, sedangkan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, serta regresi sederhana menggunakan SPSS. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan ADD termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata capaian 89%, sedangkan pemberdayaan masyarakat berada pada kategori baik dengan rata-rata 87% yang mencakup akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan kemandirian. Namun, hasil regresi sederhana mengindikasikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya memberikan sumbangsih sebesar 0,9% dalam mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, sedangkan 99,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun implementasi ADD berjalan baik, dampaknya terhadap kemandirian masyarakat masih terbatas.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Proses ini diawali dengan perencanaan melalui musyawarah desa, dilanjutkan dengan penganggaran yang transparan dan pelaksanaan program di bidang infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

18

Indexed



SINTA 5



masyarakat. Pengawasan dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan desa (Ra'is Yeni & Rini, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan tradisi. Dalam struktur pemerintahan, kepala desa berperan sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris, bendahara, dan kepala urusan sesuai bidang masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa (Obe et al., 2023).

Pemanfaatan Dana Desa difokuskan pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup, pelayanan publik, serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019, prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Peningkatan anggaran setiap tahun menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari tingkat desa.

Desa Rijang Panua, yang terdiri atas dua dusun yaitu Tellang-Tellang dan Macege, menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan ADD, seperti rendahnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa. Selain itu, beberapa penerima bantuan tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan secara optimal, sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berjudul "*Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Rijang Panua*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan ADD serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis, akademik, dan praktis bagi pemerintah desa, masyarakat, serta pelaku UMKM dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data disajikan dalam bentuk angka. Sesuai dengan pendapat Arikunto (2006:12), penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengungkapan data dalam bentuk angka, mulai dari pengumpulan, analisis, hingga penyajian hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2010:81), sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik tertentu. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus **Slovin** dengan tingkat kesalahan tertentu, dan hasil perhitungannya diperoleh **88 responden**. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah **probability sampling** dengan pendekatan **simple random sampling**, yaitu pemilihan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Sujarweni, 2015).

PEMBAHASAN

Uji Deskriptif Responden

Tabel 1: Hasil Uji Deskriptif

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki - Laki	40	45.45%
2.	Perempuan	48	54.55%

	Jumlah	88	100%
--	--------	----	------

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	19 - 30 Tahun	34	38.64%
2.	31 – 45 Tahun	23	26.14%
3.	46 -60 Tahun	25	28.41%
4.	61 – 75 Tahun	6	6.82%
5.	Jumlah	88	100%

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1.	SD	19	21.59%
2.	SLTP	16	18.18%
3.	SLTA	33	37.50%
5.	D2	1	1.14%
6.	D3	1	1.14%
7.	S1	17	19.32%
8.	S2	1	1.14%
	Jumlah	88	100%

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil uji instrumen menggunakan alat SPSS 20 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai r hitung berada diatas nilai rtabel yaitu dengan nilai 0,361 sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dalam instrumen valid dan dapat digunakan untuk mengukur setiap variabel penelitian. Begitu juga hasil yang ditunjukkan pada uji realibilitas instrumen, terlihat bahwa keseluruhan nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,60, maka disimpulkan bahwa keseluruhan item pada instrumen penelitian reliabel dan memiliki kenadalan untuk digunakan dalam mengukur variabel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2: Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28,057	3,257		8,614	,000
	Penelolaan Alokasi Dana Desa	,107	,124	,092	,860	,392

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat
Sumber data: Hasil Olahan Data SPSS

Berdasarkan hasil analisis tabel *Coefficients*, diperoleh persamaan regresi antara Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X) dan Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebagai berikut:

$$Y = 28,057 + 0,107X.$$

Nilai konstanta sebesar **28,057** menunjukkan bahwa ketika variabel pengelolaan dana desa bernilai nol, tingkat pemberdayaan masyarakat tetap positif. Koefisien regresi sebesar **0,107** bermakna bahwa setiap peningkatan pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diikuti peningkatan pemberdayaan masyarakat secara searah. Selain itu, nilai **beta standar 0,092** mengindikasikan bahwa variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh dominan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Rijang Panua.

Uji Hipotesis (Ada Pengaruh X dan Y)

Tabel 3: ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2,343	1	2,343	,739	,392b
	Residual	272,737	86	3,171		
	Total	275,080	87			

a. Predictors: (Constant), Penelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, dengan nilai F hitung 0,739 dan nilai signifikansi 0,392, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen—komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan transparansi—secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Nilai *Sum of Squares* regresi sebesar **2,343** dan residual **272,737** menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel berada dalam kategori baik, dengan variabel komunikasi memiliki nilai rata-rata tertinggi, menandakan peran penting komunikasi dalam mendukung efektivitas pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Komunikasi – Menurut Nichols & Stevens, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan untuk mencapai pemahaman bersama. Hasil penelitian menunjukkan 88% responden menilai komunikasi baik, menandakan masyarakat mudah menerima informasi terkait pengelolaan dana desa.

b. Sumber Daya – Menurut Drucker, sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi. Sebanyak 87% responden menilai sumber daya baik, menunjukkan ketersediaan tenaga yang kompeten dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

c. Disposisi – Robbins & Judge menyatakan disposisi adalah sikap atau kecenderungan perilaku yang memengaruhi respons individu. Hasil data menunjukkan 88% responden menilai disposisi baik, menandakan aparat desa siap dan konsisten dalam mengambil keputusan.

d. Struktur Birokrasi – Struktur birokrasi adalah susunan formal tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk efektivitas organisasi (Robbins & Judge). Sebanyak 94% responden menilai sangat baik, menunjukkan koordinasi dan alur kerja pengelolaan dana desa berjalan jelas dan teratur.

e. Transparansi – Menurut Hood, transparansi adalah keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan 86% responden menilai baik, menandakan masyarakat memahami penggunaan dana desa secara jelas dan terbuka.

Pemberdayaan Masyarakat

a. Akses – Menurut Narayan, akses adalah kemampuan memperoleh sumber daya, informasi, dan layanan. Hasil penelitian menunjukkan 87% responden menilai baik, menandakan masyarakat memiliki kesempatan cukup untuk berpartisipasi dan memanfaatkan sumber daya desa.

b. Partisipasi – Harris menyatakan partisipasi adalah keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Sebanyak 88% responden menilai baik, menunjukkan masyarakat aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

c. Kontrol – Menurut UNDP, kontrol adalah kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menilai program pembangunan. Hasil data 88% responden menilai baik, menandakan masyarakat mampu ikut mengambil keputusan sehingga program sesuai kebutuhan lokal.

d. Manfaat – Menurut Korten, manfaat adalah dampak positif nyata dari program bagi masyarakat. Sebanyak 87% responden menilai baik, menunjukkan program dana desa memberikan hasil nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

e. Kemandirian – Zimmerman menyebut kemandirian sebagai kemampuan mengelola sumber daya tanpa ketergantungan penuh. Hasil penelitian **86% responden menilai baik**, menunjukkan masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya desa secara mandiri sehingga pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rijang Panua secara umum berjalan baik, dengan rata-rata indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan transparansi sebesar 89%, menunjukkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat melalui ADD juga berada pada kategori baik dengan rata-rata 87%, mencakup akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan kemandirian, meskipun kemandirian ekonomi belum sepenuhnya optimal. Hasil regresi sederhana menunjukkan hubungan positif tetapi sangat lemah antara pengelolaan ADD dan pemberdayaan masyarakat ($R = 0,092$; $R^2 = 0,009$), artinya ADD hanya memberikan kontribusi 0,9%, sedangkan 99,1% dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian, meskipun pengelolaan ADD baik, dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat masih terbatas.

REFERENSI

- Aditya Achmad Fathony Muhammad Iqbal Asep Sopian. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Di Desa Langosari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
- Antonius Lasa, Y., & Widi Lestari, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. In JISIP (Vol. 7, Issue 1).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

www.publikasi.unitri.ac.id

- Diah Riski Hardiana. (2023). Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal (Kebijakan Transfer Dana Ke Daerah Pada Realisasi APBN 2021 Pasca Corona Virus Disease-19).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1).
- Jurusan, J., Pemerintahan, I., Dapla, N., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Debula Kecamatan Kwelamdua Kabupaten Yahukimo).
- Kaikimbinop, B., & Wicaksono, I. (2024). Dana Desa Dalam Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukosari Kecemata Sukowono (Vol. 1).
- Lestari, E., Kuswana, D., & Djati, G. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Vol. 5).
- Magister, M. W., Pendidikan, A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).
- Masri Ermawijaya. (2023). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemerataan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa JayaKecamatan Jirak Jaya Kabupatem Musi Banyuasin). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)*, 7(1), 29–46. <http://jurnal.stier.ac.id/index.php/ak>
- Noor Khatija Ibrohim, S., & Puspita Dwi, M. (2022). Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan.
- Obe, R., Usboko, I., & Seran, M. S. B. (2023). Modalitas Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Peneliti di Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023).
- Maryadi. (2020). Membandingkan Hasil Uji Statistika Dan Nonparametrik (Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dana Idle Pemerintah Daerah). *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 4(1), 142–149.
- Ra'is Yeni, D. U., & Rini, T. (2024). Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 20162024. *JADMENT: Journal of Administration & Development Published by Penerbit Forind*, 1(2), 89–102.
- Raybould, A. (2006). Problem formulation and hypothesis testing for environmental risk assessments of genetically modified crops. *Environmental Biosafety Research*, 5(3), 119–125. <https://doi.org/10.1051/ebr:2007004>
- Risandewi, T., Aratri, H., & Nugroho Balitbang Prov Jateng, E. (n.d.). Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan.
- Riswan Rambe, G. R. T. F. A. (2023). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Wienda Damayanti. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Pratiwi, A. T. B., Nurmayasari, I., Silviyanti, S., & Nikmatullah, D. (2023). Tingkat Keberdayaan Peserta Program Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development*, 5(3), 198–203. <https://doi.org/10.23960/jsp.vol5.no3.2023.173>
- Kurniawan, H., Setiawan, R., Vladimirov Mladenov, S., & Ardiansyah, M. (2023). Sustainable Development Through Community Empowerment Based On Local Wisdom. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 41(2), 164–176. <https://idm.kemendesa.go.id/>
- Oleh, H. F. (n.d.). *Kebijakan dan Manajemen Publik Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

23

Indexed



SINTA 5

